



**ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI MUHAMMAD BAQIR ASH-SHADR  
DAN RELEVANSINYA DENGAN TANGGUNG JAWAB NEGARA  
TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM**

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam  
Program Studi Hukum Islam

Oleh  
**AZHARIAH KHALIDA**  
NIM. 88310164

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
IMAM BONJOL PADANG  
2018**

## PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi yang berjudul “ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI MUHAMMAD BAQIR ASH-SHADR DAN RELEVANSINYA DENGAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM” yang ditulis oleh Azhariah Khalida, NIM. 88310164 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Ujian Disertasi Terbuka (promosi Doktor).

Padang, 1 April 2018

Promotor



Prof. DR. Amir Syarifuddin



Prof. DR. Mahnur Syarif, S.H, M.Ag

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
PADANG

## ABSTRAK

Azhariah Khalida, 88310164, **Analisis Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash-Shadr dan Relevansinya dengan Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam**, Program Studi Hukum Islam, Program Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, 2018, 308 halaman.

Sumber daya alam merupakan bagian dari kepemilikan umum yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat yang dikuasakan kepada negara untuk mengolahnya agar kemudian dapat dimanfaatkan kembali bagi kepentingan negara dan rakyat. Pengelolaan kekayaan alam merupakan tanggung jawab negara sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr. Negara berwenang mengintervensi aktivitas ekonomi dalam masyarakat dan berkewajiban mengatur aktivitas ekonomi tersebut.

Usaha pengelolaan sumber daya alam, terutama sektor pertambangan biasanya membutuhkan modal yang besar dan teknologi yang maju. Karena itu di Indonesia, pemerintah melibatkan penanam modal untuk kegiatan perusahaan sumber daya alam. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Keberadaan undang-undang ini menimbulkan kritikan dari masyarakat, karena dengan undang-undang ini memberikan peluang cukup besar kepada penanam modal asing untuk menguasai sumber daya alam Indonesia sehingga akan mengakibatkan kerugian bagi bangsa Indonesia dalam jangka panjang.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk tanggung jawab negara terhadap pengelolaan sumber daya alam menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr? Bagaimana relevansi pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam? Bagaimana implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan penanaman modal?

Untuk menjawab persoalan tersebut dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data *library research* (penelitian kepustakaan) dengan menelusuri pemikiran tokoh yang penulis teliti. Terkait dengan kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sumber daya alam dan penanaman modal penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Selanjutnya dalam menganalisis data penulis menggunakan metode *content analysis* (analisis isi).

Berdasarkan penelusuran dan penelitian penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa; bentuk tanggung jawab negara terhadap pengelolaan sumber daya alam menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr adalah dengan ikut terlibat secara aktif terhadap kegiatan produksi melalui pengawasan dan pengarahan otoritas hukum. Karena hukum Islam menugaskan negara untuk menjamin kebutuhan seluruh individu dalam masyarakat dengan memanfaatkan kekayaan

alam, yang dilandasi prinsip jaminan sosial, prinsip keseimbangan sosial dan prinsip intervensi negara.

Terdapat relevansi antara pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr tentang pengelolaan sumber daya alam dengan kebijakan penanaman modal di Indonesia, yaitu: 1) Kewenangan yang diberikan pemerintah kepada pihak tertentu melalui kuasa pertambangan atau izin usaha pertambangan dapat digolongkan kepada *iqtha'* dan sebagai imbalan atas izin yang diberikan, negara berhak memperoleh pajak atau sejumlah pembayaran lainnya. Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pihak tertentu tidak mengakibatkan beralihnya kepemilikan area pertambangan dan bahan tambang yang masih berada di dalam bumi. 2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia sebagai bagian dari usaha pengelolaan sumber daya alam relevan dengan pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr yaitu pemerintah bertanggung jawab menjamin kebutuhan hidup masyarakat dengan cara menyediakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Kegiatan penanaman modal akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan sarana-sarana publik yang membutuhkan tenaga kerja yang banyak yang mengutamakan tenaga kerja dalam negeri. 3) Pemerintah Indonesia telah mengisi ruang kosong yang belum ditetapkan secara rinci oleh hukum Islam mengenai pengaturan pengelolaan sumber daya alam melalui peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatur usaha pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan dilakukan melalui mekanisme perusahaan berupa kontrak/perjanjian, kuasa pertambangan dan izin usaha. Untuk kegiatan usaha pertambangan yang membutuhkan modal yang besar dan teknologi yang canggih, sementara modal atau teknologi yang dimiliki pemerintah tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan tersebut, pemerintah membuka kesempatan bagi penanam modal swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan perekonomian bangsa karena akan membuka peluang bagi ketersediaan lapangan kerja untuk menyokong peningkatan ekonomi rakyat dalam rangka mewujudkan keseimbangan sosial. Kegiatan penanaman modal merupakan bentuk kerja sama berupa penyertaan modal yang dapat menghindarkan pihak yang kekurangan modal dari berhutang yang mengandung riba. Dengan demikian dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam ini telah menerapkan sebagian dari prinsip-prinsip ekonomi Islam.

## ABSTRACT

Azhariah Khalida, 88310164, Analysis of Muhammad Baqir Ash-Shadr's Economic Thought and its Relevance toward State Responsibility on Natural Resource Management, Islamic Law Studies Program, Postgraduate Program UIN Imam Bonjol Padang, 2018, 308 pages.

Natural resources is a part of the common ownership collectively owned by people. In managing the natural resources, the state has authority to empower it, so it can be used for the state and also the people. The natural resources management is state responsibility which is suggested by Muhammad Baqir Ash-Shadr. The state is responsible to manage the economic activity in society.

Natural resource management is closely related to the investment since it needs cost a lot and advanced technology, for instance mining sector. To increase the real economic potential in Indonesia, the government then issued an Investment law regulation, namely Law number 25 year 2007. This regulation initially raises public concern and criticism whether this investment policy, those involving foreign investors, will actually cause harm to the Indonesian people for the future.

From the explanation above, the writer defines three problem formulation in this research. First, what is the state's responsibility toward natural resources management based on Muhammad Baqir Ash-Shadr? Second, are there any relationship between investment policy in Indonesia in natural resource management with the thought of Muhammad Baqir Ash-Shadr? Third, how does the Indonesian governments policy manage natural resources and capital investment?

In this research, the writer used library research to collect the data by tracing arguments related to Muhammad Baqir Ash-Shadr thought related to government policy on natural resources management and capital investment, the writer used the statute approach. In analyzing data the writer used content analysis method.

As the result, this research finally can be concluded that; according to Muhammad Baqir Ash-Shadr, the state's responsibility toward the natural resources management is being involved to work on productive activities, and the rules of Islamic law which became the principle in economic activity. Islamic law empowers the state to give supervision and direction of the legal authorities. Islamic law commits the state to ensure the needs of people by utilizing natural resources, based on principal of social security, social equilibrium and state intervention.

There are some relationship between the thought of Muhammad Baqir Ash-Shadr in the natural resources management with the investment policy in Indonesia. First, that is the authority granted by the government to a certain party through mining or mining permits can be classified to *iqtha'*. As the return of the permits granted, the government entitled to tax or other payments. Mining

business conducted by certain parties cannot shift the ownership of mining areas and mining materials still in the earth. Second, the purpose of Indonesian investment is relevant to Muhammad Baqir Ash-Shadr's theory, the government is responsible for the living needs people. The investment will help the government in providing extensive employment opportunities for the community and public facilities. This condition will require a large numbers of domestic workers so that they can live in standards livings. Third, the Indonesian government has been set up the management of natural resources which have not been specified in detail by Islamic law.

In managing natural resources, especially in mining sector, the government used the utilization mechanism in the form of contracts/agreements, mining concessions and business licenses. Since mining activities require substantial capital and advance technology, the government gived opportunities to private investors both domestic and foreign. Investment activities aim to improve the nation's economy because it will open opportunities for employment availability to support the improvement of the people's economy to realize social balance. Investment activities are a form of cooperation in the form of equity participation that can avoid those who lack capital from debt contains usury. Thus in this natural resource management policy has applied some of the principles of Islamic economics.



## ملخص الرسالة

للباحثة أزهارية خالدة؛ رقم القيد : 88310164 ؛ عنوان البحث : تحليل أفكار محمد باقر الصدر ومدى تناسبها مع مسؤولية الدولة في إدارة الموارد الطبيعية ؛ قسم الشريعة الإسلامية ، الدراسات العليا ، بالجامعة الإسلامية الحكومية إمام بونجول بادانج ، 2018 ، 308 صفحة.

الثروات الطبيعية أو الموارد الطبيعية جزء من المال العام الذي يملكه جموع الشعب ويخولون للدولة إدارته وتنميته من أجل مصلحة الدولة والشعب . وقد طرح العلماء نظريات مختلفة بشأن إدارة الثروة الطبيعية من بينها نظرية مسؤولية الدولة التي اقترحها محمد باقر الصدر. وبحسب هذه النظرية فإن للدولة أن تتدخل في النشاط الاقتصادي للمجتمع وأنها ملزمة بتنظيم هذا النشاط الاقتصادي بسياسات ديناميكية تتكيف مع تغيرات الزمن . وإحدى هذه الواجبات وضع تشريعات للأمور التي لم تنظمها نصوص الشريعة الإسلامية بالتفصيل.

وترتبط إدارة الموارد الطبيعية بإندونيسيا ارتباطا وثيقا بالاستثمار لأن إدارة الموارد الطبيعية ، ولاسيما في قطاع التعدين يتطلب رؤوس أموال كبيرة وتكنولوجيا متقدمة . ومن أجل زيادة الإمكانيات الاقتصادية الحقيقية للدولة أصدرت حكومة إندونيسيا قانونا خاصا وهو القانون رقم 25 لعام 2007 عن الاستثمار. وقد أثار هذا القانون في بداية صدورها انتقادات ومخاوف من المجتمع مما إذا كانت سياسة الحكومة بشأن الاستثمار، خاصة ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي ، ستسبب أضرارا للشعب الإندونيسي على مدى الطويل .

واستنادا إلى هذه الخلفية ، تكون صياغة مشكلة البحث كالاتي : ما هي آراء محمد باقر الصدر عن مسؤولية الدولة تجاه إدارة الموارد الطبيعية ؟ ما هي سياسة الحكومة الإندونيسية في تنظيم إدارة الموارد الطبيعية والاستثمار في إندونيسيا ؟ ما مدى ملاءمة سياسات الاستثمار في إندونيسيا في سياق إدارة مواردها الطبيعية مع أفكار محمد باقر الصدر في هذا الشأن ؟

وللإجابة على هذه الأمور استخدمت الباحثة منهج الدراسات المكتبية في جمع بيانات البحث بتتبع الأدلة والنصوص ذات صلة بالموضوع وأفكار محمد باقر الصدر فيه . وفيما يتعلق بسياسات الحكومة تجاه إدارة الموارد الطبيعية والاستثمار استخدمت الباحثة المقاربة القانونية (statute approach) وفي تحليل البيانات استخدمت الباحثة منهج تحليل المحتوى (content analysis).

وبناءً على ما تم بحثه استتبطن الباحثة أنه وفقاً لمحمد باقر الصدر فإن إدارة الموارد الطبيعية يجب أن تعتمد على أحكام الشريعة الإسلامية التي نصّ عليها الإسلام في صورة الحث على العمل والقيام بالأنشطة الإنتاجية والاعتماد على قواعد الشريعة الإسلامية كأساس للنشاط الاقتصادي . وتسمح الشريعة الإسلامية للدولة بالتدخل في الإنتاج من خلال إشراف وتوجيه السلطات القانونية . وتُلزم الشريعة الإسلامية الدولة بضمان احتياجات جميع الأفراد في المجتمع عبر الاستفادة من مواردها الطبيعية بناء على مبدأ الضمان الاجتماعي ، ومبدأ التوازن الاجتماعي ومبدأ تدخل الدولة .

وتتم سياسة الحكومة الإندونيسية في تنظيم أعمال إدارة الموارد الطبيعية في قطاع التعدين من خلال آلية الاستغلال في صورة عقود أو اتفاقات ، والحقوق في التعدين ، وتراخيص الأعمال . وبما أن أنشطة التعدين تتطلب رؤوس أموال وتكاليف كبيرة وتكنولوجيا مناسبة ، فعندما لم تملك الحكومة هذه الامكانيات للقيام بعمليات التعدين ، تفتح الحكومة فرصاً للمستثمرين من القطاع الخاص على الصعيدين - المحلي والأجنبي - بالاستثمار في صورة استثمار مباشر (direct investment) ينظمه القانون . ومن الأمور التي ينظمها القانون تعيين مجالات الأعمال المسموحة والمحظورة للاستثمار الأجنبي ومجالات الأعمال المسموحة بشروط حسب ما يفصله المرسوم الرئاسي لرئيس الجمهورية .

بين أفكار محمد باقر الصدر حول إدارة الموارد الطبيعية تتناسب مع سياسة الاستثمار في إندونيسيا ، فالحق الممنوح من قبل الحكومة لطرف معين من خلال



إصدار حق التعدين أو تصريح القيام بالتعدين يمكن تصنيفه إقطاعا ، ومقابل هذه التصاريح الممنوحة يحق للدولة الحصول على ضريبة أو مبالغ من مدفوعات أخرى . وكذلك أنشطة التعدين التي يقوم بها بعض الأطراف فإنه لا يؤدي إلى تحوّل في ملكية مناطق التعدين ومواد التعدين التي لا تزال تحت الأرض . وظهر التناسب نفسه بين الغرض من الاستثمار في إندونيسيا وفكرة محمد باقر الصدر في هذا الموضوع ، بأن الحكومة مسؤولة عن ضمان احتياجات الناس المعيشية عبر توفير فرص عمل واسعة لهم . وستشجع سياسة الاستثمار على خلق فرص عمل جديدة ومرافق عامة تتطلب عددا كبيرا من القوى العاملة وفي مقدمتها القوى العاملة المحلية . ويترتب على هذا التنظيم خلق توازن في مستوى المعيشة للمجتمع . وفي هذه الحالة ملأت الحكومة الإندونيسية مساحات فارغة يتعلق بإدارة الموارد الطبيعية لم يحددها الشريعة الإسلامية بالتفصيل .

\*\*\*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
PADANG